

Peran Kiai dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Blitar Tahun 2020

Andi Prasetyo, Meidi Kosandi

^{1,2} Universitas Indonesia, Depok, Indonesia

Email : aprast2904@gmail.com, meidi.kosandi@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji peran Kiai dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Blitar tahun 2020, khususnya dalam mendukung pasangan calon petahana. Fokus utama adalah memahami bagaimana Kiai, sebagai bagian dari jaringan sosial non-partai, menjangkau dukungan pemilih dan mengapa mereka gagal memenangkan pasangan calon petahana. Penelitian ini juga mengeksplorasi motivasi Kiai dalam memberikan dukungan serta bentuk relasi patron-klien antara Kiai dan santri atau masyarakat pemilih. Melalui metode deskriptif kualitatif, penelitian ini mengungkap bahwa meskipun dukungan Kiai dan ulama penting, faktor kharisma pribadi kandidat dan keterbatasan kampanye akibat pandemi Covid-19 juga sangat mempengaruhi hasil pemilihan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang dinamika politik lokal dan peran penting Kiai dalam kontestasi politik di Kabupaten Blitar.

Kata Kunci: Kiai, Pemilihan, Bupati, Dukungan Politik, Ulama, Santri, Petahana

Abstract

This study examines the role of Kiai in the 2020 Blitar Regency Regent and Deputy Regent Election, especially in supporting the incumbent candidate pair. The main focus is to understand how Kiai, as part of a non-party social network, captures voter support and why they failed to win over the incumbent candidate's pair. This study also explores the motivation of Kiai in providing support and the form of patron-client relationship between Kiai and students or the voting community. Through qualitative descriptive methods, this study reveals that although the support of Kiai and ulama is important, the personal charisma of the candidates and the limitations of the campaign due to the Covid-19 pandemic also greatly affect the election results. The results of this study are expected to provide insight into local political dynamics and the important role of Kiai in political contestation in Blitar Regency.

Keywords: Kiai, Election, Regent, Political Support, Ulama, Santri, Incumbent

Pendahuluan

How to cite:	Andi Prasetyo, Meidi Kosandi (2024) Peran Kiai dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Blitar Tahun 2020, (5) 7
E-ISSN:	2722-5356
Published by:	Ridwan Institute

Indonesia sebagai negara yang baru saja memasuki masa demokratisasi pasca-otoritarianisme tentu menyiratkan hubungan patron-klien yang berbeda, bergantung pada konteks situasi politik yang mendasarinya (Ramadhan & Oley, 2019);(Ansyari, Harsasto, & Fitriyah, 2019). Pelaksanaan Pilkada langsung sering kali memunculkan fenomena yang menggambarkan hubungan patron dan klien (Chalik, 2017);(Haboddin, 2020). Salah satu fenomena tersebut yaitu kekerabatan yang keberadaannya semakin menguat dan dimanfaatkan oleh elit politik dengan mengoptimalkan jaringan politik, sosial, dan kekerabatan tersebut untuk memperoleh dukungan publik yang cukup besar (Fitriana, 2018);(Egreteau, 2017). Selama perjalanan Pilkada, fenomena jaringan sosial masih kental mewarnai dinamika politik di daerah (Hertanto & Mulyaningsih, 2017). Praktik tersebut biasanya ditandai adanya penguasaan sumber daya politik oleh minoritas elite terutama elite lokal (Mahadi, 2015). Pada saat yang sama tampak ketergantungan klien terhadap sumberdaya tersebut.

Pada umumnya, fenomena dalam Pilkada langsung sering melibatkan jaringan informal yang digambarkan melalui jaringan kekerabatan, relasi keluarga yang dimiliki sebagai sumberdaya dan modal dalam bentuk pemilih, sampai kepada pemanfaatan jaringan organisasi yang memiliki basis massa yang besar (Mahsun, 2020). Penelitian ini, ingin menggambarkan keterlibatan para Kiai di Kabupaten Blitar dalam upaya memenangkan Pasangan Calon Petahana pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Blitar Tahun 2020. Di dalam kasus ini, peran Kiai dapat dilihat melalui praktik politik lokal yang melibatkan struktur dan jajaran kepengurusan pondok pesantren serta basis massa yang dimiliki.

Petahana memanfaatkan keberadaan Kiai untuk mempertahankan kekuasaannya dalam Pilkada Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Blitar, sebuah daerah di Provinsi Jawa Timur dengan pusat pemerintahan di Kanigoro. Keikutsertaan Petahana dalam Pilkada seringkali menarik perhatian karena sebagian besar dari mereka berhasil memenangkan pemilihan. Dalam kontestasi kali ini, dua pasangan calon bersaing memperebutkan jabatan eksekutif, termasuk Mak Rini dan Rahmat Santoso, yang dikenal sebagai Makde Rahmat. Sebagai pendatang baru dalam politik lokal, Makde Rahmat memiliki latar belakang pendidikan di bidang hukum dari Universitas Merdeka Malang dan merupakan seorang pengusaha sukses. Dia juga menjabat sebagai Ketua Umum IPHI dan memiliki hubungan dengan Pondok Pesantren PETA Tulungagung, tempat ia pernah belajar.

Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, Rini Syarifah dan H. R. Santoso, sebagai pendatang baru dalam perpolitikan Kabupaten Blitar, berhasil menunjukkan kekuatan mereka meskipun hanya didukung oleh tiga partai politik. Mereka berhasil mengalahkan pasangan petahana Drs. Rijanto, M.M. dan Marhaenis Urip Widodo, mencatatkan sejarah baru dalam Pemilihan Kabupaten Blitar. Pemilihan Serentak Tahun 2020 yang diadakan di tengah pandemi Covid-19 seharusnya menguntungkan petahana, seperti dikatakan oleh Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan, karena petahana masih menjabat dan memiliki program Bantuan Sosial (Bansos) sebagai modal elektoral untuk meningkatkan elektabilitas.

Keuntungan lain yang diperoleh Petahana yaitu di masa pandemi tersebut, yaitu para penantang petahana tidak bisa bergerak dengan leluasa menemui masyarakat. Mereka takut terpapar virus Covid-19. Apalagi ada aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang melarang masyarakat berkumpul. Kondisi ini membuat penantang tidak bisa bersosialisasi diri dengan mengumpulkan banyak orang. Namun, Petahana bisa tampil dengan baik atau pura-pura baik di hadapan masyarakat dengan dalih pembagian Bansos. Kalau penantang Petahana, menggunakan kondisi tersebut untuk melakukan sosialisasi, dimungkinkan akan mendapat penilaian buruk dari Pemilih, karena di masa demikian orang lagi sibuk mempertahankan diri untuk tetap hidup, mereka malah sosialisasi kampanye.

Selain keuntungan-keuntungan tersebut, keikutsertaan Petahana dalam Pilkada juga memiliki keuntungan lain (Andrian & Wardani, 2021). Pertama, sebagai pemegang kendali lembaga eksekutif petahana memiliki wewenang penuh menggunakan program-program pembangunan untuk membangun citra diri. Secara tidak langsung mereka memiliki rentang waktu dan kesempatan lebih luas berkampanye. Cukup dengan mengklaim bahwa keberhasilan pembangunan adalah buah kerja kerasnya sebagai kepala daerah, maka simpati lebih mudah diraih.

Kedua, dari sisi popularitas tentu saja sosok Petahana lebih dikenal dari pada calon lain. Jika calon yang akan mengajukan diri dalam Pilkada perlu biaya dan energi lebih besar untuk sekedar memperkenalkan diri kepada masyarakat, maka Petahana tidak perlu melakukannya. Sebab dengan jabatannya dia sudah otomatis mendapatkan popularitas di kalangan masyarakat.

Ketiga, sebagai kepala daerah di Kabupaten Blitar, Rijanto-Marhaenis Urip Widodo dipandang sebagai sosok pemimpin yang lengkap, hampir tidak pernah mengalami benturan maupun konflik yang berarti dengan kelompok masyarakat maupun dengan aparat hukum. Sikapnya yang ramah dan santun serta mengayomi dapat menjadi magnet yang kuat untuk meraih simpati.

Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar, Petahana mendapat dukungan kuat dari partai politik, termasuk PDI-Perjuangan, dan sejumlah Kiai dan Ulama. Meski demikian, kerja keras partai pengusung dan para Kiai dalam menggalang dukungan massa tidak berpengaruh signifikan pada pilihan pemilih. Kemenangan lebih ditentukan oleh branding pribadi masing-masing calon daripada dominasi partai pendukungnya. Pilkada Serentak 2020 yang berlangsung di tengah pandemi Covid-19 membatasi ruang gerak kampanye, sehingga upaya mobilisasi dukungan harus dilakukan dengan cara-cara aman yang mematuhi protokol kesehatan. Kemenangan atau kekalahan kandidat dalam kontestasi politik tidak hanya ditentukan oleh strategi, tetapi juga oleh seberapa rapi dan solid jaringan tim sukses yang dibentuk. Paslon Petahana, meskipun memanfaatkan dukungan dari Kiai sebagai klien untuk menjaring pemilih, tidak berhasil mempertahankan posisinya sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Blitar.

Pasangan Mak Rini-Makde Rahmat yang tak pernah diperhitungkan akan memenangkan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Blitar justru mendapat dukungan mayoritas dari para pemilih. Pasangan Calon Rini Syarifah dan H.R. Santoso yang

didukung 3 (tiga) partai dengan ideologi Islam mampu menarik massa dari basis massa pendukung partai politik pemenang Pemilu. Untuk mendapatkan jabatan Bupati dan Wakil Bupati dilakukan melalui kompetisi yang sering dikenal dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada sekarang disebut dengan Pemilihan).

Perebutan jabatan orang nomor 1 dan nomor 2 di Kabupaten Blitar menunjukkan adanya kompetisi antara elite politik dan massa dimana kompetisi tersebut merupakan suatu aspek dari pergulatan untuk menentukan siapa yang unggul dengan perolehan suara terbanyak maka dialah yang disebut sebagai pemenang. Telah terjadi sirkulasi elite politik di Kabupaten Blitar, massa yang diwakili Pasangan Calon Rini Syarifah dan H.R. Santoso berhasil menjadi elite politik dengan mengalahkan Pasangan Calon Rijanto dan Marhaenis U.W. yang merupakan representasi dari elite politik atau Petahana.

Sirkulasi elite politik di tingkat lokal dalam penelitian ini akan berfokus pada peran Kiai dalam memberikan dukunan terhadap pasangan calon petahana dan relasi patron klien yang dijalankan Kiai dengan santri dan/atau masyarakat Pemilih. Di samping itu, pemberian sumbangan terhadap pembangunan masjid maupun pondok pesantren dinilai sebagai cara yang dilakukan Paslon Petahana dalam membangun jaringan dengan para kiai setempat. Dengan pemberian sumbangan maupun kerap meresmikan masjid maupun pondok pesantren dihadapkan dapat memberikan imbal balik berupa dukungan terhadap Paslon Petahana dalam mempertahankan kekuasaannya. Kiai tersebut merupakan wujud representasi dari patron, sedangkan Santri dan/atau masyarakat Pemilih merupakan perwujudan dari klien (Misra et al., 2021).

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana peran Kiai sebagai bagian dari jaringan sosial non-partai dalam menjaring dukungan pemilih untuk memenangkan Paslon Petahana (Incumbent) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Blitar Tahun 2020, mengapa para Kiai gagal dalam usaha tersebut, dan apa motivasi para Kiai dalam membantu Paslon Petahana. Tujuannya adalah untuk menggali dan mendeskripsikan peran Kiai dan Ulama dalam konteks politik lokal, serta memahami bentuk relasi patron-klien antara Kiai dan santri serta masyarakat pemilih selama proses Pilkada.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan paradigma perilaku sosial. Kajian ini berfokus pada struktur dan pranata sosial. Variabelnya berfokus pada kelompok, bukan individu. Kedua, paradigma definisi sosial. Paradigma ini lebih ditekankan pada tindakan sosial individu, namun terkadang juga sekelompok individu. Metode yang digunakan dalam paradigma ini adalah metode observasi dan wawancara mendalam (*depth interview*). Ketiga, paradigma perilaku sosial. Kajian dalam paradigma ini cenderung pada hubungan antar individu dan hubungan individu dengan lingkungannya. Pemilihan paradigma perilaku sosial disesuaikan dengan tujuan penelitian ini, yaitu memahami peran Kiai dalam upaya pemenangan Paslon Petahana pada Pilkada Kabupaten Blitar Tahun 2020.

Penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan informasi, pengajuan pertanyaan terbuka pada partisipan dan rekam catatan-catatan lapangan, analisa data berdasarkan tema dan kategori, pencarian pola umum, generalisasi, atau teori dari tema atau kategori yang dibuat. Proses ini diakhiri generalisasi atau teori dari literatur-literatur dan pengalaman. Pemilihan Metode penelitian tersebut dimaksudkan untuk mendeskripsikan secara empiris dinamika politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Blitar Tahun 2020. Studi kasus yaitu peneliti meneliti secara cermat dan berusaha mengungkapkan suatu keadaan atau peristiwa atau keadaan obyek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Peneliti mengumpulkan secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan.

Lokasi penelitian berada di Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur, sebagai lokasi terjadinya kegagalan Petahana dalam meraih suara dan dukungan Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Blitar Tahun 2020. Pengumpulan data dilakukan dengan melalui sumber data primer dan data sekunder. Sumber data primer berasal dari informan atau responden di lapangan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan pihak-pihak yang terlibat langsung atau mengetahui secara langsung peristiwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Blitar Tahun 2020. Sumber data sekunder berupa buku, tesis, skripsi, artikel dan pemberitaan media massa yang dilakukan dengan studi pustaka. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan beberapa teknis sebagai berikut: a) Wawancara Mendalam. b) Studi Kepustakaan

Pengolahan data penelitian ini menggunakan pendekatan interaktif yang terdiri dari lima langkah yang tidak harus selalu sesuai dengan susunan. Langkah-langkah tersebut adalah mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis; membaca keseluruhan data; menganalisis lebih detail dengan meng-coding data (mengolah menjadi segmen); menerapkan proses coding untuk mendeskripsikan setting, orang, kategori dan tema; menarasikan melalui gambar dan tabel; serta terakhir adalah menginterpretasi atau memaknai data.

Hasil dan Pembahasan

Peran Kiai dalam Masyarakat

Ada dua faktor utama yang memperkuat posisi Kiai dalam masyarakat. Pertama, Kiai adalah orang yang berpengetahuan luas yang kepadanya penduduk desa belajar pengetahuan. Kepandaian dan pengetahuannya yang luas tentang Islam menyebabkan Kiai selalu mempunyai pengikut, baik para pendengar informal yang senantiasa menghadiri pengajian atau ceramahnya maupaun para santri yang tinggal di pondok sekitar rumahnya. Kedua, Kiai adalah biasanya berasal atau keturunan dari keluarga berada baik ekonomi maupun pengetahuan (Afra, 2021). Dari dua faktor tersebut Kiai dipandang sebagai elit nasional, elit pesantren, dan elit desa di Jawa. Santri dan masyarakat atau para penduduk sekitar pondok yang mentaatinya sebagai para pengikutnya merupakan sumber daya manusia yang menopang kedudukan dan kepemimpinan kiai dalam masyarakat.

Sumber daya ekonomi yang dimiliki Kiai menjadi penentu berlangsungnya kehidupan bagi para santri dan para penduduk sekitar. Karena, sumber ekonomi dapat menjadi sarana para Kiai terhadap besarnya pengaruh yang dimiliki. Dengan kekayaan ekonomi, seorang Kiai dapat melakukan apa saja atau dapat menciptakan sebuah pola patronase yang menghubungkannya dengan umat di pesantren. Dengan sumber daya manusia dan ekonomi yang dimiliki Kiai inilah secara tidak langsung Kiai menjadi orang yang disegani dan dihormati di lingkungan pesantren dan di luar pesantren. Karena pola hubungan antara Kiai dengan umat di pesantren bukan dibangun atas dasar kesetaraan, melainkan hubungan patron-klien. Disamping adanya hubungan patron-klien, sumber yang juga dimiliki oleh Kiai adalah pengetahuan dalam segala hal. Kiai sering kali dianugerahi pengetahuan yang luar biasa, yang jarang terjadi pada umat di pesantren pada umumnya.

Pola Hubungan Kiai dan Santri

Pola hubungan ini terdapat tiga unsur yaitu Kiai, santri dan masyarakat. Pola ini didasarkan atas kepemimpinan kharismatik yang dimiliki oleh Kiai. Hubungan antara Kiai, santri, dan masyarakat dimungkinkan oleh kenyataan bahwa umat Islam sama-sama menerima konsep dan pengalaman keagamaan yang menciptakan gaya kepemimpinan yang sama. Kharisma yang dimiliki oleh para Kiai menyebabkan posisi kepemimpinan dalam lingkungannya menjadi terealisasi. Selain sebagai pemimpin agama dan masyarakat, Kiai juga memimpin sebuah pondok pesantren Dimana ia tinggal. Di lingkungan pondok pesantrenlah hubungan Kiai dan santri, semata-mata Kiai bukan hanya guru mengajar pengetahuan agama, tetapi Kiai juga dianggap sebagai seorang bapak atau orang tuanya sendiri. Dengan landasan seperti itu, posisi Kiai sebagai Patron dan Santri yang menjadi Klien.

Berdasarkan pada nilai-nilai yang eksis dan melembaga di lingkungan pondok di wilayah Blitar. Nilai-nilai tersebut ada sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur yang mengarah pada pembentukan hubungan patron-klien antara Kiai-Santri dan Masyarakat sebagaimana diungkapkan Scott. Pertama, hubungan patron-klien mendasarkan diri pada pertukaran yang tidak seimbang yang mencerminkan perbedaan statis. Santri sebagai Klien telah menerima banyak jasa yang diperankan oleh Kiai. Sehingga, tidak boleh tidak Klien terikat dan tergantung pada Patron. Kedua, hubungan patron-klien bersifat personal.

Pola resiprositas yang personal antara Kiai-Santri menciptakan rasa kepercayaan dan ketergantungan di dalam mekanisme hubungan tersebut. Hal ini dapat dilihat pada budaya penghormatan Santri kepada Kiai yang cenderung bersifat kultus pribadi. Ketiga, hubungan patron tersebar menyeluruh, fleksibel dan tanpa batas kurun waktunya. Pola ini biasanya termanifestasi dalam kegiatan atau acara-acara pengajian umum di daerah-daerah yang Kiai (Patron) memiliki kewajiban untuk menyampaikan nilai-nilai ajaran agama terhadap masyarakat dimanapun. Di sini tampak jelas bahwa Kiai sebagai Patron memiliki hubungan yang cukup luas tidak hanya bagi para Santri dan Masyarakat sekitar melainkan Masyarakat di luar lingkungan pondok pesantren.

Peran Kiai dalam Upaya Pemenangan Pasangan Calon Petahana Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024

Menurut Mul Khan (2007), Kiai adalah gelar kehormatan yang diberikan oleh masyarakat kepada seorang ahli agama Islam yang memimpin dan mengajar kitab-kitab klasik pada santrinya sebelum terjun ke politik praktis. Pengaruh Kiai dalam politik berasal dari dua sumberdaya: hubungan kekerabatan dan intelektual serta jabatan formal dalam partai politik maupun organisasi NU. Hubungan kekerabatan dan intelektual memperkuat pengaruh ekonomi dan politik Kiai melalui relasi genealogi sosial dan intelektual.

Peran Kiai sebagai konsolidator jaringan politiknya bertujuan untuk memastikan keselarasan pandangan politik di antara anggota kelompoknya. Mobilisasi suara pemilih, terutama dari kalangan santri, merupakan bagian penting dari partisipasi politik yang sering dimobilisasi oleh Kiai, karena masyarakat yang kuat tradisi agamanya lebih mudah didekati dan digerakkan oleh tokoh agama atau elit politik yang berbasis pesantren.

Peran Kiai dalam Pembentukan Setting Sosial Politik di Kabupaten Blitar

Tradisi Sowan kepada Kiai

Tradisi mengunjungi atau yang lebih dikenal dengan sebutan “sowan” kepada para Kiai merupakan hal yang lumrah terlihat menjelang Pemilu maupun Pilkada. Hal tersebut tampak terlihat semenjak KH. Abdurrahman Wahid alias Gus Dur menjadi pemimpin negeri ini. Para politisi yang bisa dikatakan kurang begitu dekat dengan kalangan ulama atau Kiai pun, ketika menjelang perhelatan lima tahunan tersebut merasa perlu mengahendakan acara khusus untuk bersilaturahmi dengan seorang Kiai yang dipandang kharismatik (Noor, 2019). Apalagi bagi mereka yang sejak awal dekat dengan para Kiai, sowan atau pertemuan dengan Kiai merupakan langkah penguatan legislasinya untuk mendapatkan restu Kiai untuk maju dalam bursa pemilihan sebagai Pemimpin.

Tradisi sowan juga tampak terjadi dalam proses penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020. Pasangan calon berduyun-duyun sowan kepada para Kiai. Sebagai pemimpin informal yang memiliki basis massa, Kiai adalah sosok yang wajib didatangi para politisi menjelang Pilkada. Tujuan utamanya adalah kepentingan untuk mendapatkan kontribusi suara dari komunitas pesantren dan masyarakat yang menghormati para Kiainya. Sedangkan para Kiai sendiri menyadari akan maksud kedatangan para politisi itu. Sebagai tuan rumah, para Kiai menerima dan menghormati tamu dari manapun juga, entah pada akhir pertemuan Kiai dan pesantren mendapatkan sebuah “penghargaan” dari tamunya, itu lain persoalannya. Namun, persoalan utamanya adalah Kiai merupakan unsur kekuatan politik yang harus dipertimbangkan dalam proses politik semacam Pilkada.

Para Kiai di Wilayah Kabupaten Blitar tidak Secara Utuh Mendukung Pasangan Calon Petahana

Keterlibatan Kiai dalam aktivitas politik bukan hal yang asing lagi, melainkan menjadi hal yang lazim terjadi khususnya di wilayah Kabupaten Blitar. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh motif dan kepentingan yang dimiliki para Kiai tersebut, baik untuk kemaslahatan orang banyak maupun individu sehingga mereka terlibat aktif dalam perpolitikan. Peran Kiai dalam berbagai aktivitas sosial termasuk dalam perpolitikan

tentu memiliki alasan-alasan tertentu sehingga mereka terdorong untuk terlibat secara aktif di dalamnya. Keterlibatan Kiai dalam Pilkada Kabupaten Blitar tahun 2020 didasari oleh berbagai factor dan tujuan kepentingan sehingga mereka terlibat secara intens dalam memperjuangkan Paslon yang didukungnya.

Seperti telah diutarakan oleh Syafinunaja, bahwa pada pelaksanaan Pilkada Kabupaten Blitar tahun 2020, Kiai lebih memosisikan sebagai “jujukan” umat. Yang diartikan bahwa secara pribadi masing-masing, Kiai pada waktu itu lebih banyak menjadi pemberi solusi (Tabroni, saipul Malik, & Budiarti, 2021). Ketika ada umat atau masyarakat yang datang kemudian meminta solusi, fatwa, atau pendapat, pasti akan diberikan solusi dukungan oleh para Kiai tersebut. Kemudian ketika media mencitrakan dukungan Kiai tersebut sebagai sebuah dukungan, maka dukungan tersebut sebatas pencitraan saja (Wawancara Syafinunaja, 29 Mei 2024).

Peran Kiai sebagai Mobilisator Suara Pemilih dalam Upaya Mendukung Pasangan Calon Petahana

Pada dasarnya politik NU cukup terbuka. Seperti halnya yang dilakukan oleh Hj. Masluchi Syaifulloh sebagai Ketua Muslimat NU dalam hal ini mewakili politik perempuan yang diakomodasi di dalam Kelompok Muslimat, dalam satu tubuh NU tidak ada keterikatan. NU secara organisasi besarnya memberikan dukungan kepada Paslon Lawan. Namun demikian Hj. Masluchi Syaifulloh yang merupakan bagian dari NU memberikan dukungan kepada Paslon Petahana. Hal tersebut menunjukkan bahwa NU cukup dinamis (Wawancara Muhammad Bahaudin, 29 Mei 2024). Nahdlatul Ulama sendiri sebagai organisasi juga mengambil jarak, sempat ada beberapa gerakan tapi untuk memobilisasi tingkat di bawahnya tidak ada. Tim 9 dinilai gagal karena rekomendasinya tidak dipenuhi oleh PKB (Wawancara Syafinunaja, 29 Mei 2024).

Dalam konteks menggerakkan para umatnya untuk ikut memilih pilihan Kiai, menurut H.M. Arif Faizin, hal tersebut telah terjadi pergeseran. Jika urusan agama mengikuti Kiai, namun jika urusan politik menjadi pilihan masing-masing. Kiai tidak pernah memobilisasi massa, H.M. Arif Faizin menambahkan bahwa Kiai berbagi tugas. Ada perbedaan tipis antara fragmatis dengan pilihan untuk secara diam-diam membagi tugas. Sebagian Kiai mendukung Paslon Petahana, dan sebagian lagi mendukung Paslon baru. Para Kiai bisa menghormati dan menghargai pilihan masing-masing dan tidak berusaha untuk memusuhi orang yang tidak satu pilihan, memprovokasi, dan mempersuasi pilihan agar sama dengan pilihannya. Apalagi masyarakat sekarang jauh lebih pintar, para Kiai tahu bahwa jamaahnya ini tidak mudah untuk digiring, tidak mudah untuk mengikuti instruksi apa yang dikehendaki Kiai (Wawancara H.M. Arif Faizin, 29 Mei 2024).

Motivasi Politik Kiai dalam Mendukung Pasangan Calon Petahana

Menurut H.M. Arif Faizin, pandangan Kiai terhadap politik menjadi penting, karena politik merupakan alat untuk mencapai tujuan. Kalau politik diisi oleh orang-orang yang tidak tepat maka tujuannya akan tidak tercapai. Dalam konteks keagamaan tujuan yang ingin dicapai adalah terjalin kehidupan berkeagamaan dengan baik (Wawancara H.M. Arif Faizin, 29 Mei 2024). Pilkada Kabupaten Blitar Tahun 2020 diikuti oleh 2

(dua) Paslon Bupati dan Wakil Bupati yang didukung oleh kekuatan politik (partai politik) dan jaringan sosial non politik seperti Kiai dan Ulama.

Dalam Pilkada Kabupaten Blitar tahun 2020, salah satu calon bupati adalah Rijanto sebagai calon Bupati Petahana berpasangan dengan Calon Wakil Bupati Petahana. Menurut Rijanto, secara umum dukungan yang didapat oleh Paslon Petahana untuk maju kembali dalam mempertahankan kekuasaannya sangat luar biasa, baik dari partai politik maupun tokoh masyarakat dan Kiai di wilayah Kabupaten Blitar. Hal tersebut didukung pula lembaga survey yang selalu memberikan hasil survey yang baik bagi Paslon Petahana (Wawancara Rijanto, 30 Mei 2020).

Penyebab Para Kiai Pendukung Pasangan Calon Petahana tidak dapat Memenangkan Pasangan Calon Petahana dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2020

Dukungan Kiai kepada Pasangan Calon Petahana tidak Utuh

Pasca sowan kepada para Kiai mengenai rencana pencalonan Petahana dalam Pilkada Kabupaten Blitar 2020, tidak semua Kiai merespon positif. Kiai Hazizi Abdullah, anggota PBNU Kabupaten Blitar, menyatakan tidak mendukung Paslon Petahana karena pemilihan calon wakil bupati menimbulkan antipati di kalangan Kiai dan Ulama. Pengurus Cabang NU Kabupaten Blitar membentuk Tim Sembilan untuk menyeleksi calon bupati dan wakil bupati yang akan diusulkan ke PKB. Meskipun ada dukungan publik terhadap Paslon Petahana, dukungan Kiai tidak solid dan tidak disertai tindakan konkrit. Beberapa Kiai, seperti dari Kampung Coklat, tetap mendukung Paslon Petahana, tetapi dukungan tersebut tidak maksimal dan tidak diikuti dengan mobilisasi massa atau kampanye aktif oleh Kiai Sepuh.

Isu Kelemahan Calon Wakil Bupati Petahan

Penolakan para Kiai terhadap pencalonan Wakil Bupati Petahana didasarkan pada daftar hitam yang dimiliki oleh calon tersebut, yang dianggap harga mati oleh Kiai Hazizi Abdullah. Isu-isu mengenai kelemahan calon wakil bupati ini, seperti memiliki banyak istri, suka adu ayam, mengakomodir preman, dan terlibat dalam penataan personal yang memicu konflik, juga memperkuat penolakan. Meskipun calon bupati petahana memiliki kepribadian baik, calon wakilnya dianggap tidak layak. Dukungan terhadap Paslon Petahana dari Kelompok Muslimat, meskipun tetap diberikan oleh Ketua Muslimat Hj. Masluchi Syaifullah, tampak setengah hati. Deklarasi dukungan yang dilakukan oleh elit Muslimat lebih bersifat seremonial dan tidak signifikan karena di tingkat ranting dan cabang, Muslimat sudah dekat dengan PKB, menunjukkan dukungan yang tidak utuh dan solid.

Motor Penggerak Partai Politik Pendukung Pasangan Calon Petahana tidak Berjalan

Pasangan calon Petahana didukung oleh gabungan partai politik dengan total 33 kursi, namun dukungan ini tidak disertai upaya maksimal untuk memenangkan mereka. Menurut Rijanto, Tim Pemenangan dari gabungan partai politik tersebut merasa terlalu percaya diri karena hasil survei selalu menunjukkan keunggulan Petahana. Hal ini dimanfaatkan oleh Tim Paslon Lawan yang menyebarkan isu bahwa Petahana sudah pasti menang, membuat Tim Pemenangan Petahana menjadi lengah dan tidak terlalu aktif

bergerak. Selain itu, dalam Susunan Tim Pemenangan Paslon Petahana yang didaftarkan ke KPU, tidak melibatkan Kiai dan Ulama yang mendukung Paslon Petahana dalam deklarasi, sehingga mereka tidak merasa berkewajiban untuk melakukan kampanye kepada pendukungnya (Wawancara Rijanto, 30 Mei 2024).

Adanya Gerakan Barisan NU Bersatu

Tim Pemenangan Paslon Lawan tidak hanya mengandalkan isu kelemahan calon wakil bupati petahana dan kedudukan kuat Petahana, tetapi juga melakukan Gerakan Baret Merah. Gerakan ini, yang awalnya beroperasi di Jawa Tengah dan Tuban, kemudian dialihkan ke Kabupaten Blitar setelah Paslon yang didukungnya kalah di daerah sebelumnya. Gerakan ini dikendalikan oleh Keluarga Pondok Blitar Tulungagung dan bertujuan untuk mengarahkan pemilih dengan tingkat pendidikan rendah untuk memilih Paslon Lawan dengan menggunakan praktik money politic. Meskipun dianggap tidak etis, peran Gerakan Baret Merah diakui cukup signifikan dalam membantu Tim Paslon Lawan sebagai alat pemenangan (Wawancara Rijanto, 30 Mei 2024).

Situasi Pandemi Covid-19

Tim Pemenangan Paslon Lawan tidak hanya mengandalkan isu kelemahan calon wakil bupati petahana dan kedudukan kuat Petahana, tetapi juga melakukan Gerakan Baret Merah. Gerakan ini awalnya beroperasi di Jawa Tengah dan Tuban, kemudian dialihkan ke Kabupaten Blitar setelah Paslon yang didukungnya kalah di daerah sebelumnya. Dikendalikan oleh Keluarga Pondok Blitar Tulungagung, gerakan ini bertujuan mengarahkan pemilih dengan tingkat pendidikan rendah untuk memilih Paslon Lawan dengan praktik money politic.

Meskipun kontroversial, peran Gerakan Baret Merah diakui cukup signifikan dalam membantu Tim Paslon Lawan sebagai alat pemenangan. Situasi pandemi Covid-19 juga memengaruhi strategi kampanye. Pembatasan dalam metode kampanye mengharuskan kampanye berbasis pada pembentukan pemilih yang cerdas, sedangkan pertemuan besar yang berpotensi menimbulkan kerumunan dilarang. Kondisi ini memaksa Tim Pemenangan Paslon Petahana untuk berhati-hati dalam kampanye, karena kegagalan dalam upaya penanggulangan penyebaran Covid-19 dapat digunakan oleh Paslon Lawan sebagai senjata politik (Wawancara Rijanto, 30 Mei 2024).

Kesimpulan

Peran Kiai dalam masyarakat dan politik Indonesia dapat dilihat dari dua aspek utama: peran struktural dan peran kultural. Peran kultural Kiai cenderung lebih dominan dibandingkan peran struktural, meskipun keduanya tidak bisa sepenuhnya dipisahkan. Faktor utama yang memperkuat posisi Kiai adalah pengetahuan luas mereka tentang Islam dan status sosial ekonomi yang baik, yang menjadikan mereka figur berpengaruh di tingkat nasional, pesantren, dan desa. Kiai berfungsi sebagai pemimpin spiritual dan sosial, membangun hubungan patron-klien dengan santri dan masyarakat melalui kepemimpinan kharismatik.

Selain itu, Kiai juga sering berperan sebagai mediator antara masyarakat pedesaan dan pemerintah, mengoptimalkan pengaruh mereka baik di tingkat lokal maupun

nasional. Kiai kampung, khususnya, memainkan peran penting dalam membimbing masyarakat, dengan fokus pada pengajaran agama, kepemimpinan moral, dan penyampaian fatwa agama. Mereka berinteraksi langsung dengan rakyat kecil, menjembatani kesenjangan antara masyarakat dan lingkaran kekuasaan, serta menunjukkan dedikasi yang tinggi dalam pelayanan keagamaan dan sosial. Dalam subkultur pesantren, Kiai berperan sebagai penghubung antara dunia pesantren dan dunia luar, bertindak sebagai broker budaya yang menyaring berbagai kepentingan, termasuk politik. Kiai mempertimbangkan loyalitas santri dan pengakuan dari pemerintah untuk menghindari marginalisasi pesantren.

Pengaruh politik Kiai berasal dari hubungan kekerabatan dan intelektual, serta jabatan formal dalam partai politik atau organisasi seperti NU. Dalam Pilkada Kabupaten Blitar 2020, tradisi "sowan" atau kunjungan calon kepala daerah kepada Kiai adalah hal umum untuk mendapatkan dukungan. Meskipun calon bupati petahana memiliki hubungan baik dengan para Kiai, kombinasi calon wakil bupati yang kontroversial menyebabkan dukungan tidak sepenuhnya solid. NU, melalui Tim Sembilan, menolak pasangan petahana dan mencoba mengusung calon lain, meskipun dukungan internal NU tetap dinamis. Keterlibatan Kiai dalam politik didorong oleh berbagai kepentingan, baik kolektif maupun individual.

BIBLIOGRAFI

- Afra, Nida. (2021). *Film Sang Kiai (Kajian Metode Dakwah KH Hasyim Asy'ari)*. UIN Ar-Raniry.
- Andrian, Achmad, & Wardani, Sri Budi Eko. (2021). Peran Modal Politik dan Modal Sosial Pencalonan Suryana dan Wiwin Suwindaryati Melalui Jalur Perseorangan Pada Pilkada Kabupaten Garut Tahun 2018. *Journal of Politics and Democracy*, 1(1), 28–45.
- Ansyari, Irvan, Harsasto, Priyatno, & Fitriyah, Fitriyah. (2019). Analisis Patron Klien Terhadap Kemenangan Partai Golkar Kabupaten Tanah Datar Sejak Reformasi. *Indonesian Journal of Religion and Society*, 1(1), 12–23.
- Chalik, Abdul. (2017). *Pertarungan elite dalam politik lokal*. Pustaka Pelajar Yogyakarta.
- Egreteau, Renaud. (2017). *The emergence of pork-barrel politics in parliamentary myanmar*. ISEAS–Yusof Ishak Institute Singapore.
- Fitriana, Mia Kusuma. (2018). Peranan Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara (Laws And Regulations In Indonesia As The Means Of Realizing The Country'S Goal). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12(2). <https://doi.org/10.54629/jli.v12i2.403>.
- Haboddin, Muhtar. (2020). Sirkulasi elite lokal di Bantaeng. *Jurnal Transformative*, 6(1), 72–90.
- Hertanto, Hertanto, & Mulyaningsih, Handi. (2017). Bupati Perempuan Pertama Di Lampung Dan Kegagalan Calon Petahana Pada Pilkada Di Lampung Timur Tahun 2015. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 16(2).
- Mahadi, Ujang. (2015). Komunikasi politik kiai pada kampanye pemilu. *Addin*, 9(2), 229–252.
- Mahsun, Muhammad. (2020). Demokrasi Patronase dan Praktik Politik Uang: Pengalaman Pemilu Legislatif 2014 di Kota Palembang, Sumatera Selatan. *JPW*

- (*Jurnal Politik Walisongo*), 2(1), 13–26.
- Misra, Fauzan, Sudarmoko, Sudarmoko, Apriwan, Apriwan, Hakim, Amri, Kabullah, Muhammad Ichsan, & Rahman, Fajri. (2021). Kontekstualisasi Pilkada Riau: Sosiokultural, Relasi Klientalistik dan Indikasi Politik Uang. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 7(1), 43–56.
- Mulkhan, Abdul Munir. (2007). *Pesan dan kisah Kiai Ahmad Dahlan dalam hikmah Muhammadiyah*. 231.
- Noor, Muslichan. (2019). Gaya Kepemimpinan Kyai. *Jurnal Kependidikan*, 7(1), 141–156.
- Ramadhan, Muhammad Nur, & Oley, Jimmy Daniel Berlianto. (2019). Klientelisme sebagai Perilaku Koruptif dan Demokrasi Banal. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 5(1), 169–180.
- Tabroni, Imam, saipul Malik, Asep, & Budiarti, Diaz. (2021). Peran Kyai Dalam Membina Akhlak Santri Di Pondok Pesantren Al-Muinah Darul Ulum Desa Simpangan Kecamatan Wanayasa. *Jurnal Pendidikan, Sains Sosial, Dan Agama*, 7(2), 108–114.

Copyright holder:

Andi Prasetyo, Meidi Kosandi (2024)

First publication right:

Syntax Admiration

This article is licensed under:

